

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN PADA *VISUM
ET REPERTUM* DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

RINI DAMAYANTI
10300113081

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 23 Agustus 2017

Penyusun



Rini Damayanti
10300113081

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian pada *Visum et repertum* dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan di Wilaah Hukum Polrestabes Makassar ” yang disusun oleh Rini Damayanti, NIM: 10300113081, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 3 Dzul Hijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa,

25 Agustus 2017 M.

3 Dzul Hijjah 1438 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	()
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.SI	()
Munaqisy I	: Rahmiati, S.Pd, M.Pd	()
Munaqisy II	: Subehan Khalik, S.Ag, M.Ag	()
Pembimbing I	: Dra. Nila Sastrawati, M.SI	()
Pembimbing II	: Azhar Sinilele, S.H, M.H	()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

NIP. 19570414 1986031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Damayanti

NIM : 10300113081

Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 09 September 1995

Jurusan : Hukum Pidana & Ketatanegaraan

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat : Jl.Dg Tata Komp.Hartaco Indah blok 3R No 14

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian pada *Visum et repertum* dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 23 Agustus 2017

Penyusun

Rini Damayanti
10300113081

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian pada *Visum et repertum* dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar”, yang disusun oleh Rini Damayanti, NIM: 10300113081, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 25 Agustus 2017 M , bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Samata, 25 Agustus 2017 M

3 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Satrawati, M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Rahmiati, S.Pd., M.Pd	(.....)
Munaqisy II	: Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Nila Satrawati, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Azhar Sinilele, S.H., M.H	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP:19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT seru sekalian alam, karena atas rahmatnya dan ridho-NYA, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul ***“Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar”*** sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) program Studi Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar. Serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beserta sahabatnya.

Merangkai kata menjadi kalimat, kemudian membahas dan menyatukan menjadi suatu karya ilmiah merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan pemikiran, dan konsentrasi penuh untuk dapat mewujudkannya.

Dari lubuk hati yang terdalam penulis mengucapkan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Adri Ismail dan ibunda Fatma Haryani tercinta yang dengan penuh cinta dan kesabaran serta kasih sayang dalam membesarkan, mendidik, dan mendukung penulis yang tidak henti-hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis, juga untuk saudaraku tersayang Dian Mayasari, Muh.Alfian Akbar dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Begitu pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para wakil Rektor, dan seluruh Staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan maksimal
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dan Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini
3. Ibunda Dra. Nila Sastrawati, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Ibunda Dr. Kurniati, M.Hi, selaku Sekretaris Jurusan Pidana dan Ketatanegaraan
4. Ibunda Dra. Nila Sastrawati sebagai pembimbing I yang telah memberikan banyak kontribusi ilmu dan berbagai masukan- masukan yang membangun terkait judul yang diangkat. Dan Bapak Azhar Sinilele, SH.,MH juga sebagai dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait metode penelitian dalam skripsi ini.
5. Ibunda Hj. Rahmiati, S.Pd.,M.Pd sebagai penguji I yang telah memberikan banyak kontribusi ilmu dan berbagai masukan- masukan yang membangun terkait judul yang diangkat. Dan Bapak Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag juga sebagai dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus selaku penguji II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait metode penelitian dalam skripsi ini.
6. Pejabat Kepolisian Polrestabes Makassar, yang selalu menyempatkan waktu selama penelitian berlangsung.
7. Sahabat terkasih Ainul Apriyana Aswar amd.kep yang selama ini sudah memberikan semangat kepada penulis.

8. Teman-teman terkasih Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 2013, terima kasih banyak atas kebersamaan dan bimbingannya selama ini.
9. Teman-teman Himpunan Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Periode 2015-2016.
10. Teman-teman seperjuangan kelas HPK B 2013
11. Teman-teman seperjuangan PPL Peradilan khususnya keluarga besar Pengadilan Negeri Mamuju.
12. Teman-teman seperjuangan KKN Angkatan 53 Kec.Tinggimoncong, Kel.Bulutana Malino, Kab.Gowa.
13. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selama ini membantu dan mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini tidaklah mungkin menjadi sempurna. Dengan mengingat setiap kekurangan yang ada, penulis telah berusaha memaksimalkan diri untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Namun penulis mengerti bahwa hasil penelitian ini masih perlu untuk disempurnakan lagi. Mohon para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Penulis

RINI DAMAYANTI

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL/ILUSTRASI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-10
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11-39
A. Pengertian Pembuktian	11
B. Pengertian Tindak Pidana.....	12
C. Pengertian Penyidikan.....	22
D. Pengertian Perkosaan.....	26
E. Pengertian <i>Visum Et Repertum</i>	31
F. <i>Visum Et Repertum</i> sebagai alat bukti.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	40-44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	42

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45-58
A. Gambaran Umum mengenai lokasi penelitian.....	45
B. Kekuatan <i>Visum Et Repertum</i>	47
C. Faktor yang menjadi kendala <i>Visum Et Repertum</i> dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan..	55
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai pembuktian menggunakan <i>Visum Et Repertum</i> dalam Tindak Pidana Perkosaan.....	55
BAB V PENUTUP.....	59-62
A. Kesimpulan	59
B. Implikasi Penelitian.....	60
KEPUSTAKAAN	61-62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL/ILUSTRASI

Tabel	I	Tentang Fokus Penelitian dan Deskripsi.....	47
-------	---	---	----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fat ah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	<i>fat ah</i> dan <i>y '</i>	ai	a dan i
و	<i>fat ah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى ... ا ...	<i>fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>y '</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *m ta*

رَمَى: *ram*

قِيلَ: *q la*

يَمُوتُ: *yam tu*

4. T ' marb ah

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua, yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb* ahdiikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaankedua kata itu terpisah, maka *t ' marb* ahituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rau ah al-a f l*

: الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *al-mad nah al-f ilah*

: الْحِكْمَةُ *al- ikmah*

5. Syaddah (Tasyd d)

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan sebuahtanda *tasyd d* (ّ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: رَبَّنَا *rabban*

: نَجِينَا *najjain*

: الْحَقَّ *al- aqq*

: نَعْمَ *nu“ima*

: عَذْوٌ *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf*maddah* menjadi ī.

Contoh:

: عَلِيٌّ : ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: عَرَبِيٌّ : ‘Arab (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلد : *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na*

النَّوْع : *al-nau'*

شَيْء : *syai'un*

أُمُورُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. *Laf al-Jal lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِالله dīnullāh billāh

Adapun *t ' marb ahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *Laf al-Jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum f ra matill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi Bakkatamub rakan

Syahru Rama n al-la unzila f h al-Qur' n

Na r al-D n al- s

Ab Na r al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *sub nah wa ta' l*

saw. = *allall hu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sal m*

H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

NAMA : RINI DAMAYANTI
NIM : 10300113081
JUDUL : Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan di wilayah hukum Polrestabes Makassar pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi kedalam beberapa sub masalah yaitu : bagaimana kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan di wilayah hukum Polrestabes Makassar?, kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan kasus perkosaan di wilayah hukum Polrestabes Makassar?, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembuktian yang menggunakan *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan?

Jenis Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan (*field research*) atau dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan syar'i. Sumber data diperoleh dari data primer berupa observasi, wawancara, dan data sekunder berupa studi kepustakaan dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan yang diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Penelitian ini berlokasi di Polrestabes Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, keberadaan *visum et repertum* sangat dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana perkosaan dalam hal ini *visum et repertum* selalu menjadi barang dalam penyidikan tindak pidana perkosaan, *visum et repertum* memiliki kekuatan yang sangat penting bagi penyidik khususnya untuk mengetahui adanya unsur persetubuhan dan unsur kekerasan yang terjadi pada diri korban, *visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang harus selalu ada dalam setiap pemeriksaan perkara perkosaan hingga tahap persidangan, *visum et repertum* sama sekali tidak memiliki kendala apapun dalam pembuktian perkara tindak pidana perkosaan karna pada dasarnya *visum et repertum* sangat membantu dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan dan dalam Islam juga menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian menggunakan *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan kekuatannya sama dengan kekuatan pembuktian perkosaan yang menggunakan empat orang saksi.

Implikasi dari penelitian ini bahwa sebaiknya permintaan *visum et repertum* ini dibuat oleh dokter ahli forensik yang dimana mengerti dan ahli dibidangnya, serta mengingat *visum et repertum* tidak memiliki kendala apapun jadi semoga kedepannya mengenai *visum et repertum* itu lebih mudah dan cepat terselesaikan dan pembuktian dalam Islam haruslah saksi yang betul-betul mengetahui kronologi kasus tindak pidana perkosaan itu sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia menghadapi banyak masalah kekerasan, baik yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Masyarakat mulai resah dengan adanya berbagai kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kondisi seperti ini membuat perempuan dan anak-anak menjadi lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan bukan hanya kekerasan secara fisik tetapi dapat juga meliputi kekerasan terhadap perasaan atau psikologis, ekonomi dan seksual seperti perkosaan. Pada kasus perkosaan pelaku tidak hanya melakukan pelanggaran hukum namun terkait pula dengan akibat yang dialami oleh korban dan timbulnya rasa takut masyarakat secara luas.

Perkosaan yang terjadi di masyarakat sekarang ini semakin tinggi, dapat dikatakan kejahatan perkosaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Lebih buruknya lagi salah satu dari pelaku tindak pidana perkosaan adalah teman dekat atau bahkan orang disekitarnya.

Perkosaan merupakan suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, karna perkosaan dilakukan dalam suatu perbuatan yang memaksakan seseorang perempuan untuk bersetubuh diluar perkawinan. Bahkan perkosaan adalah puncak dari pelecehan seksual yang paling mengerikan yang bagi setiap adalah hal yang menakutkan dan tidak seorang perempuan pun yang menginginkannya. Tindak pidana perkosaan sering menimbulkan luka traumatik yang mendalam.

Banyak hal yang bisa mengakibatkan perkosaan terjadi, ada karena kebetulan bertemu, misalnya perempuan itu minta tumpangan kendaraan, sehingga pembuat mendapat kesempatan untuk memperkosanya. Ada yang memang sudah kenal lama, bahkan telah berpacaran, yang pada kesempatan tertentu laki-laki itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia, yang semula perempuan itu masih mempertahankan keperawanannya.¹

Bahkan ada yang sudah kumpul kebo yang pada suatu saat laki-laki itu minta hubungan kelamin yang ditolak dengan suatu alasan oleh pasangannya itu, lalu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pasangannya itu bersetubuh dengan dia, yang karena ini di luar nikah, maka pendefinisian berdasarkan Pasal 285 KUHP ia melakukan perkosaan.²

Dari sudut pandang ini maka menghukum pelaku menjadi tujuan utama dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu semua komponen dalam proses peradilan pidana mengarahkan perhatian dan segala kemampuannya untuk menghukum si pelaku dengan harapan bahwa dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah terulangnya tindak pidana tersebut mencegah pelaku lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga masyarakat merasa tentram karena dilindungi oleh hukum, seperti yang ada dalam KUHP pada Pasal 285 yaitu :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

¹Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta; SinarGrafika, 2011), h.15.

²Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, h.16.

Pemeriksaan suatu tindak pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah mencari kebenaran materil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.³

Untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana, sering kali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut diluar batas kemampuannya atau keahliannya. Dalam hal demikian sering kali bantuan seorang ahli sangat diperlukan untuk mendapatkan kebenaran materil selengkap-lengkapny bagi para penegak hukum tersebut.

Dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, sebagai berikut: ⁴

1. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP , bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁵
2. Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.⁶

³Rahman Syamsuddin, *Peranan Visum et repertum di Pengadilan*, (Jakarta; AL-Risalah, 2011),h.188.

⁴Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta; Rangkang Education, [tt]), h.258.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Surabaya; Karya Anda, [tt]), h.82.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, h.83.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya memberikan kebenaran materil suatu perkara pidana.

Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung pada keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiyaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Salah satu kasus yang menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku aparat penyidik sangat membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan.

Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seorang wanita dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat di pertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai suatu

laporan tertulis dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.⁷

Visum et repertum ditinjau dari segi tujuan dan penggunaan yang menunjang tegaknya keadilan, sehingga diketahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana perkosaan, terjadinya kematian terhadap korban, terjadinya penganiyaan terhadap korban. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan perkosaan terhadap diri korban/pembedahan diri mayat untuk mengetahui kelainan alat tubuh manusia yang mengalami kerusakan atau kematian tindak pidana. Demikian *visum et repertum* untuk memperlihatkan barang bukti yang secara asli sebagai pengganti barang bukti.

Dalam Hukum Islam hal ini merupakan *ijtihad* sebagai dasarnya *ma la ah mursalah* yaitu kemaslahatan yang ditetapkan dalam al-quran dan as-sunnah dan segala sesuatu yang serupa dengan kemaslahatan yang tercakup didalam *na* dan apa-apa yang sejenis dengannya bukan kemaslahatan yang berdasarkan pemikiran-pemikiran saja, apalagi tanpa pemikiran yang mendalam bahwasanya persangkaan itu melampaui kemaslahatan yang ada menurut ketentuan-ketentuan *na syara'*

Berdasarkan hadist diatas maka kedudukan *visum et repertum* sebagai penerapam *ijtihad* bagi Hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan sehingga dengan adanya keadilan itu dapat menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia oleh sebab itu menggunakan *visum et repertum* dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk menyelesaikan masalah kematian yang dibolehkan oleh *syara'* sebab merupakan realisasi dari tujuan syariat Islam.

Firman Allah swt dalam QS Al-Isra yang artinya : ⁸

⁷Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*, (Jakarta barat; Binarupa Aksara, 1997), h. 2.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٦٧﴾

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Keterkaitan ayat tersebut bahwa Islam melarang kita memberitahukan pengetahuan kepada orang lain yang pada dasarnya kita tidak ketahui, tetapi jika manusia memiliki pengetahuan maka boleh menetapkan suatu hukum untuknya berdasarkan pengetahuannya karena Allah SWT. Larangan manusia mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan, bahkan melarang mengatakan sesuatu berdasarkan persangkaan dan masing-masing dari anggota tubuh manusia dipertanyakan dan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT tentang apa yang dipikirkan dan diyakini.

Sehubungan dengan begitu pentingnya peran *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan, pada kasus perkosaan dimana pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam diri korban.

Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, hal tersebut dapat ditemukan pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana perkosaan yang terjadi.

⁸ Kementrian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, h.637.

Berdasarkan kenyataan mengenai penerapan hasil *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkat menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini dengan judul **Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian pada *Visum et repertum* dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu kekuatan pembuktian pada *visum et repertum* dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni, Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian pada *visum et repertum* dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.

- a. Tinjauan Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah.
- b. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dimuka persidangan pihak-pihak yang berperkara perdata tentu akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan hak perdatanya, namun tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja baik secara tertulis maupun lisan.

- c. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensic. Atas permintaan penyidik yang berwenang mengenal hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan proyustisia.
- d. Penyidikan adalah dalam Undang-undang tahun 1981 KUHAP di sebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- e. Perkosaan adalah tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

C. Rumusan Masalah

Untuk membatasi banyaknya permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas diformulasikan dalam Pokok Masalah :

Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian pada *Visum et repertum* dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar?

Dari pokok masalah tersebut kemudian dikemukakan sub-sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian terhadap *visum et repertum* dalam penyidikan perkara pidana perkosaan di wilayah hukum Polrestabes Makassar ?

2. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan *visum et repertum* dalam penyidikan kasus perkosaan di wilayah hukum Polrestabes Makassar ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pembuktian yang menggunakan *Visum et repertum* dalam Tindak Pidana Perkosaan ?

D. Kajian Pustaka

1. Waluyudi dalam bukunya yang berjudul *ilmu kedokteran kehakiman*. Membahas dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedokteran dan mencakup peranan ilmu kedokteran kehakiman dan tindak pidana yang memerlukan bantuan ilmu kedokteran kehakiman. Dalam ini prosedur permohonan *visum et repertum* dan urgensi ilmu serta aspek hukum praktik kedokteran.
2. Syamsuddin Pasamai dalam bukunya yang berjudul *sosiologi dan sosiologi hukum*. Suatu pengetahuan praktis dan terapan dan penelusuran ilmiah terhadap liku-liku disela-sela jurang terjal yang ada diseputar sosiologi hukum, berarti berupaya memahami dan mengetahui sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efektif dan efisien. Bahkan melalui sosiologi hukum seseorang (masyarakat, mahasiswa, akademis, praktis, dan profesional hukum). Dapat memperoleh dan memprediksi beberapa problematika hukum yang akan muncul pada masa mendatang.
3. Ahmad Hanaafi dalam buku berjudul *Asas-asas Hukum Pidana Islam* yang membahas tentang segi-segi kepidanaan dalam hukum islam, dalam bentuk yang mendekati selera zaman. Pembahasannya bersifat ilmiyyah-jami'iyah, yang mempergunakan sistem muqaranah yang agak luas dan sistematis.

4. Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi. Dalam bukunya mencakup pembaharuan Hukum Islam dan konsep pembaharuan serta faktor-faktor penyebab terjadinya pembaharuan. Serta membahas peranan ijihad dalam pembaharuan Hukum Islam. Serta peranan mashlahah mursalah dan mashlahah mulga.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitiann ini dilakukan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka penulisan Tugas akhir dengan tujuan dan kegunaan :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian terhadap *visum et repertum* dalam penyidikan perkara pidana perkosaan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar
- b. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan *visum et repertum* dalam penyidikan kasus perkosaan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembuktian yang menggunakan *Visum et repertum* dalam Tindak Pidana Perkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang kekuatan visum dalam tindak pidana perkosaan.
- b. Sebagai suatu kajian dan evaluasi terhadap penerapan penyidik dalam mengumpulkan data serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perkosaan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Pengertian Pembuktian*

Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dimuka persidangan pihak-pihak yang berperkara perdata tentu akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan hak perdatanya, namun tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja baik secara tertulis maupun lisan.

Yang dimaksudkan dengan “membuktikan” ialah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim atau Pengadilan.¹

Didalam KUHAP juga membahas tentang pembuktian :

1. Menurut pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²
2. Menurut pasal 184 KUHAP
 - a. Alat bukti yang sah ialah :
 - 1) Keterangan saksi
 - 2) Keterangan ahli
 - 3) Surat

¹Prof.R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta; PT Pradnya Paramita, 2005),h.18.

²Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya; Bhafana Publishing, 2013), h.233

4) Petunjuk

5) Keterangan terdakwa

b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan³

B. *Pengertian Tindak Pidana*

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan “feit” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”

Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang dirumuskan oleh para ahli hukum yang semuanya berbeda-beda sehingga dalam memperoleh pendefinisian mengenai tindak pidana sangat sulit. Pengertian tindak pidana menurut ahli hukum :⁴

1. Hazewinkel-Suringa

Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah dibolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

³Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Surabaya; Karya Anda, [{}]), h.82

⁴Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2011), h.8-9.

2. Simons

Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana

3. Moeljatno

Menyebutkan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dimana hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

4. Wirjono Prodjodikoro

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

5. WFC. Hattum

Hukum pidana (positif) adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

6. Pompe

Yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

7. Kansil

Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

8. Satochid Kartanegara

Hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu: Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Dan Hukum Pidana dalam arti subyektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

9. Sudarto

Menyatakan bahwa Hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (matregelan) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (justification) pidana itu.

10. WLG. Lemaire

Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (pengertian ini tampaknya dalam arti hukum pidana materiel). Jenis-jenis Pidana menurut KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok

a) Pidana mati;

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum, yaitu jiwa atau nyawa manusia. Dalam masalah pidana mati ini pada dasarnya dapat ditegaskan bahwa “KUHP” yang berlaku di Indonesia seharusnya konkordan atau sesuai dengan *wetboek van strafrecht* yang berlaku di negara Belanda”. Dikatakan seharusnya karena pada kenyataannya di Belanda pada waktu *wetboek van strafrecht* itu sendiri terbentuk pada tahun 1881 orang di negeri Belanda sudah tidak mengenal lagi Pidana Mati, karena lembaga pidana mati itu sendiri telah dihadapkan dengan Undang-undang tanggal 17 September 1870 (Stb1870 No.182) dengan alasan yang terutama bahwa pelaksanaan atau eksekusi pidana mati itu di Negeri Belanda sudah jarang dilakukan karena para terpidana hukuman mati hampir selalu telah mendapatkan pengampunan atau

grasi dari raja. Akan tetapi mereka tetap mempertahankan lembaga pidana mati itu didalam:

- 1) KUHP Militer mereka, dengan diancamkan bagi kejahatan-kejahatan:
 - a) Yang telah dilakukan oleh anggota militer dalam keadaan perang;
 - b) Yang telah dilakukan oleh anggota militer untuk kepentingan musuh, dan
- 2) Bagi beberapa kejahatan yang telah disebutkan di dalam *CRIMINEEL WETBOEK*;
- 3) Dan apabila kejahatan-kejahatan tersebut telah dilakukan di atas kapal yang sedang berada diatas lautan bebas atau sedang berada diatas perairan dari negara-negara asing baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai.

Utrecht menyatakan, hukuman mati di banyak negeri tidak lagi dikenal. Hakim di negeri Belanda tidak lagi menetapkan pidana mati. Sejak tahun 1870 hukum pidana mengenai hukum penjara seumur hidup sebagai hukuman terberat. Hal ini tidak diikuti di daerah koloni, artinya masih di pertahankan karena keadaan istimewa di daerah-daerah koloni.⁵

b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka

⁵Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung; Alfabeta, 2010), h.79-80

yang telah melanggar peraturan tersebut. Adapun pengertian Pidana Penjara yang terdapat di dalam KUHP Pasal 12 sebagai berikut⁶ :

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-berturut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

c) Pidana kurungan;

Ninie Suparni mengemukakan Pidana Kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.⁷

Sama halnya dengan pidana, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga

⁶Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Surabaya; Bhafana publishing, 2013), h.11

⁷Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dalam Sistem pemidanaan* (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), h.23

perasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga perasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga perasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

d) Pidana denda;

Pidana Denda adalah merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Adalah merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum sebagai penebus dosa dengan pembayaran uang sejumlah tertentu.⁸

e) Pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.⁹

Namun ada juga yang menyebutkan pembagian tindak pidana berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena dalam peraturan perundang-undangan perumusan tindak pidana sangat beragam. Tindak Pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut:

- a. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran

Penggolongan tindak pidana dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*Rechtdelicten*) dan pelanggaran (*Wetsdelicten*). Kejahatan diatur dalam buku II

⁸Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.104.

⁹Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Surabaya Bhafana publishing, 2013), h.11

KUHP dan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan diancam pidana lebih berat dari pelanggaran. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan.

b. Tindak pidana formal dan tindak pidana material

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya, misalnya: Penghinaan (pasal 315 KUHP). Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, misalnya: Pembunuhan (pasal 338 KUHP).

c. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana. Sedangkan tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.

d. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui

timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sedangkan tindak pidana dengan unsur kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya perduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum.

e. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan. Sedangkan tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan.

f. Delik yang berlangsung dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan yang berlangsung lama.

g. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi dengan satu kali perbuatan. Sedangkan delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali.

h. Tindak pidana *Commisionis*, Tindak pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem commissa*

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana *commisionis* merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh

perundang-undangan atau melanggar larangan, sedangkan tindak pidana omisionis merupakan tindak pidana pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undang . Tindak pidana commissionis per omissionem commissa merupakan tindak pidana commissionis tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya.

i. Tindak pidana ringan dan Tindak pidana berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

j. Tindak pidana umum dan Tindak pidana khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang, misalnya tindak pidana korupsi.¹⁰

Unsur-unsur Tindak Pidana menurut pendapat ahli :

1) Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

¹⁰ Diakses dari <http://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditemukannya/> pada tanggal 2 Juli 2017 pukul 11.14

e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

2) Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi ;

a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;

b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;

d) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;

e) Pelakunya dapat dipertanggungjawaban;

3) Sedangkan menurut EY.Kanter dan SR.Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

a) Subjek;

b) Kesalahan;

c) Bersifat melawan hukum (dan tindakan)

d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;

e) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹¹

C. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah dalam Undang-undang tahun 1981 KUHAP di sebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹².

Menurut R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut : “Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang” . Jadi penyidikan mempunyai arti yang membuat terang atau jelas.

¹¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta; Rineka Cipta, 1993), h.69.

¹²Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Surabaya; Bhafana Publishing, 2013), h.177

“Sidik” berarti juga “bekas” , sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian membuat terang suatu kejahatan.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th.2002 No.2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³

Fungsi Penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan ialah merupakan fungsi teknis reserce kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapannya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi. Sedangkan R.Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya”

Dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu

¹³Diakses dari <http://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditemukannya/> pada tanggal 2 Juli 2017 pukul 11.14

kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk menyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan.¹⁴

Mengenai pejabat yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” hal ini disebutkan juga pada pasal 6 ayat (1) KUHAP.

Pada pasal 6 ayat (2) KUHAP pasal tersebut ditentukan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.¹⁵

Dalam Peraturan Pemerintah RI No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada bab II pasal 2 ditentukan syarat kepangkatan Penyidik adalah sebagai berikut :

1. Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
2. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor

¹⁴Diakses dari <http://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditemukannya/> pada tanggal 2 Juli 2017 pukul 11.14

¹⁵R.Soeparmono, *Keterangan ahli & Visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana* (Bandung; Mandar maju, 2016), h.6.

Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Berdasarkan pengertian secara yuridis maka tugas seorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya.¹⁶

Mengenai wewenang penyidik diatur dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pda saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;

¹⁶Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Surabaya, Bhafana Publishing, 2013), h.181.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁷

Mulai dilakukannya penyidikan suatu perkara pada tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SKDP) sesuai dengan pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga tersangkanya telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut telah berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik.

Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pidana.

Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan.¹⁸

D. Pengertian Perkosaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti

¹⁷R.Soeparmono, *Keterangan ahli & Visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana* (Bandung: Mandar maju, 2016), h.17.

¹⁸R.Soeparmono, *Keterangan ahli & Visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana*), h.17.

menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan kehendak wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal ini tersebut menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.²⁰

Perkosaan juga dapat diartikan sebagai tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Beberapa pendapat mengenai pengertian perkosaan di antaranya:

¹⁹M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Bandung; PT Refika Aditama, 2010), h.28.

²⁰Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung; PT Refika Aditama, 2001), h.40.

1. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).

2. Menurut R. Sugandhi

Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Pendapat Sugandhi itu jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai “*marital rape*”, yang artinya perkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan.²¹

Adapun unsur-unsur selengkapny tentang perkosaan menurut sugandhi adalah sebagai berikut:²²

- a. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.
- b. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan.

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), h.11.

²² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), h.12.

- c. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita.
- d. Mengeluarkan air mani.

Adapun tindak pidana perkosaan dalam KUHP dalam hal persetubuhan dimuat dalam pasal 285 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut : ²³

“ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”

Apabila rumusan perkosaan diatas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

- a. Perbuatannya : memaksa bersetubuh

Caranya : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Objek : perempuan bukan istrinya.

Perbuatan memaksa bersetubuh yang dimaksud adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekankan kehendak sendiri yang bertentangan dengan kehendak orang lain.²⁵ Kekerasan dalam pengertian pasal 285 (Kekerasan yang disebut pertama) didefinisikan sebagai suatu cara atau perbuatan (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain. Untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan ini mengakibatkan orang lain menjadi tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekuasaan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama

²³ Republik Indonesia KUHP dan KUHP, (Jakarta; cet.1, Visimedia, 2007), h.97.

²⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), h.63.

²⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, h.64.

dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.²⁶

Mengenai wanita yang bukan istrinya, disini persetubuhan dilakukan terhadap perempuan yang bukan istrinya. Ditentukannya hal tersebut karena perbuatan bersetubuh dimaksudkan sebagai perbuatan yang hanya dilakukan antara suami istri dalam perkawinan.²⁷

b. Bersetubuh dengan dia.

Bersetubuh dengan dia, atau dalam hal ini saya dapat simpulkan bahwa terjadi persetubuhan. Persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi, sehingga harus terjadi :²⁸

a) *Erectio penis*,

b) *Penetratio penis* ke dalam *vagina*,

c) *Ejaculatio* dalam *vagina*.

Jika ketiga unsur ini diisyaratkan oleh hukum, maka *ejaculatio* dalam *vagina* dengan mudah dapat ditiadakan, misalnya dengan kondom atau *coitus interruptus*. Oleh karena itu, maka ilmu hukum hanya mengharuskan adanya suatu *penetratio penis* ke dalam *vagina*.

Berdasarkan unsur-unsur pasal 285 KUHP diatas dapat dikatakan bahwa tidak dapat dikatakan perkosaan apabila tidak terjadi persetubuhan karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi, padahal untuk membuktikan adanya persetubuhan sangat sulit terlebih lagi apabila korban sudah pernah bersetubuh (tidak virgin).

²⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, h.65.

²⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, h.66.

²⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, h.67.

E. *Pengertian Visum et repertum*

Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visum*” berasal dari bahasa latin, bentuk tunggalnya adalah “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *Visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan.²⁹

Dari pengertian *Visum et repertum* tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *Visum et repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal ini *Visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan. *Visum et repertum* menurut beberapa ahli :

1. Menurut *Staatsblad* *Visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*Pro iustisia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.
2. Abd Mun'im Idris memberikan pengertian *Visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.
3. Tjan Han Tjong, *Visum et repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (tanda bukti).

²⁹Diakses dari <http://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditemukannya/> pada tanggal 2 Juli 2017 pukul 11.14

Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan *corpus delicti* (tanda bukti).³⁰

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, *Visum et repertum* digolongkan menurut obyek yang diperiksa sebagai berikut :

1. *Visum et repertum* untuk orang hidup.

Jenis ini dibedakan lagi dalam :

- a. *Visum et repertum* biasa. *Visum et repertum* ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
- b. *Visum et repertum* sementara. *Visum et repertum* sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan *Visum et repertum* lanjutan.
- c. *Visum et repertum* lanjutan. Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.

2. *Visum et repertum* untuk orang mati (jenazah).

Pada pembuatan *Visum et repertum* ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi).³¹

³⁰Diakses dari <http://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditemukannya/> pada tanggal 2 Juli 2017 pukul 11.14

³¹Diakses dari <http://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditemukannya/> pada tanggal 2 Juli 2017 pukul 11.14

- a. *Visum et repertum* tempat kejadian perkara (TKP). Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.
- b. *Visum et repertum* penggalan jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalan jenazah.
- c. *Visum et repertum* psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.
- d. *Visum et repertum* barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.

Prosedur Permohonan *Visum et repertum*. Secara garis besar permohonan *visum et repertum*, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan harus dilakukan secara tertulis, oleh pihak-pihak yang diperkenankan untuk itu, dan tidak diperkenankan dilakukan melalui lisan, maupun melalui pesawat telepon.
2. Permohonan *Visum et repertum* harus diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan korban, tersangka, dan juga barang bukti kepada dokter ahli kedokteran kehakiman.

Pertimbangan dari keduanya adalah:³²

- a. Mengenai permohonan *Visum et repertum* yang harus dilakukan secara tertulis, oleh karena permohonan tersebut berdimensi hukum. Artinya, tanpa permohonan secara tertulis, dokter tidak boleh dengan serta merta melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya ataupun seseorang yang mati akibat tindak pidana atau setidaknya tidaknya patut disangka sebagai korban tindak pidana. Demikian, apabila

³² Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Jakarta; Djambatan, 2000), h.34.

dokter menolak permohonan yang dilakukan secara tertulis, maka iapun akan dikenakan sanksi hukum. Permohonan *Visum et repertum* oleh aparat hukum kepada dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan peristiwa lalu lintas hukum. Oleh karena permintaan dan juga pemenuhan dalam kaitannya dengan *Visum et repertum* tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Kegiatan pemeriksaan dokter atas seseorang, merupakan kegiatan yang diharuskan oleh hukum. Dan bukan kegiatan asal-asalan.

- b. Mengenai penyerahan korban, tersangka, dan alat bukti yang lain, didasarkan bahwa untuk dapat menyimpulkan hasil pemeriksaannya, dokter tidak dapat melepaskan diri dari dengan alat bukti yang lain. Artinya, untuk sampai pada penentuan hubungan sebab akibat, maka peranan alat bukti lain, selain korban mutlak diperlukan.

Tujuan dari *Visum et repertum* tiada lain adalah sebagai pembuktian mengenai telah terjadi semua tindak pidana, yang selanjutnya kejadian tersebut oleh dokter berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukannya. Hasil pemeriksaan tersebut, oleh hakim akan dijadikan salah satu alat bukti dalam sidang pengadilan.³³

Bentuk Umum *Visum et repertum*

Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok *Visum et repertum*, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan *Visum et repertum* sebagai berikut :

1. Pada sudut kiri atas dituliskan “*Pro Yustisia*” artinya bahwa isi *Visum et repertum* hanya untuk kepentingan peradilan.
2. Ditengah atas dituliskan jenis *Visum et repertum* serta nomor *Visum et repertum* tersebut.

³³ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, h.35.

3. Bagian Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan :

- a) Identitas peminta *Visum et repertum*.
 - b) Identitas surat permintaan *Visum et repertum* .
 - c) Saat penerimaan surat permintaan *Visum et repertum*.
 - d) Identitas dokter pembuat *Visum et repertum*
 - e) Identitas korban/barang bukti yang dimintakan *Visum et repertum*.
 - f) Keterangan kejadian sebagaimana tercantum di dalam surat permintaan *Visum et repertum*.
4. Bagian Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti.
 5. Bagian kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti.
 6. Bagian penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa *Visum et repertum* dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.
 7. Di sebelah kanan bawah diberikan Nama dan Tanda tangan serta Cap dinas dokter pemeriksa.

Dari bagian *Visum et repertum* sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada bagian pemberitaan. Sedangkan pada bagian kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.³⁴

Dari bagian *Visum et repertum* sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada Bagian Pemberitaan. Sedangkan pada Bagian Kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.

³⁴ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, h.35.

F. *Visum et repertum* Sebagai Alat Bukti

Proses penyaksian barang bukti oleh dokter akan sangat berbeda dengan penyaksian yang dilakukan seseorang yang bukan dokter. Oleh karena, apa yang dokter saksikan, apa yang didengar dan dilihatnya, merupakan perbuatan hukum yang berkonsekuensi hukum juga. Pertimbangannya adalah bahwa apa yang dilakukannya memang diminta, sementara aktifitasnya pun berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Kedua faktor inilah yang menyebabkan segala sesuatu yang berkenaan kesaksian atas korban atau setidaknya patut disangka menjadi korban tindak pidana mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.³⁵

Untuk mengetahui *Visum et repertum* termasuk alat bukti maka sudah merupakan keharusan untuk kita menguasai beberapa pasal yang ada kaitannya dengan alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 184 ayat (1), pasal 187 KUHAP, yang secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah meliputi:³⁶
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa. (Pasal 184 KUHAP).

Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan

³⁵Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, h.36.

³⁶Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Surabaya, Bhafana Publishing, 2013), h.234.

ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pemberitahuannya itu (pasal 1 ke-27 KUHAP).

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 ke-28 KUHAP).

2. Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :³⁷

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b) Surat yang dimuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang di peruntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (pasal 187 KUHAP).

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1) KUHAP). Keterangan terdakwa adalah apa yang

³⁷ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, h.36.

terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 (1) KUHAP).³⁸

Visum et repertum adalah hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar, sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana. *Visum et repertum* adalah merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan, yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan. Hal-hal sebagaimana telah penulis uraikan diatas, telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dan pasal 187 huruf c KUHAP. Dengan demikian, maka *Visum et repertum*, dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang, masuk dalam kategori alat bukti surat.³⁹

Dalam proses selanjutnya, *Visum et repertum* dapat menjadi alat bukti petunjuk. Yang demikian itu didasarkan, oleh karena petunjuk sebagaimana tersebut dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh dari:⁴⁰

1. Keterangan saksi;
2. Surat;
3. Keterangan terdakwa.

Kemudian, apabila kita berkeyakinan bahwa proses awalnya *Visum et repertum* yang selanjutnya disebut sebagai alat bukti surat yang untuk

³⁸Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Surabaya, Bhafana Publishing, 2013), h.235.

³⁹Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Jakarta; Djambatan,2000), h.37.

⁴⁰R.Soepormono, *Keterangan ahli &Visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana* (Bandung; Mandar maju,2016), h.132.

memperoleh *Visum et repertum* tersebut berasal dari kesaksian dokter terhadap seorang (baca apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang diketemukan), menunjukkan bahwa didalamnya telah terselip alat bukti berupa keterangan saksi.

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan :⁴¹

1. Untuk adanya *Visum et repertum* harus ada terlebih dahulu keterangan saksi;
2. Alat bukti surat sesungguhnya merupakan penjabaran dari *Visum et repertum*;
3. Dari alat bukti surat tersebut, dapat diperoleh alat bukti baru, yaitu petunjuk. Dengan demikian, antara keterangan saksi, *Visum et repertum*, alat bukti surat dan petunjuk, merupakan empat serangkai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

⁴¹ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Jakarta; Djambatan, 2000), h.37.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh.¹ Dengan demikian penelitian kualitatif itu bersifat mengumpulkan data dengan tidak menganalisis angka-angka, akan tetapi tidak berarti dalam penelitian kualitatif para peneliti tabu dengan angka-angka.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang keadaan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Makassar. Alasan saya memilih lokasi penelitian karna mudah dijangkau, lumayan dekat dari rumah saya dan lebih pentingnya kalau kasus seperti ini seharusnya memang di Polrestabes Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis .Penelitian dengan pendekatan Sosiologis di mana memandang hukum sebagai fenomena sosial. Penelitian hukum yang sosiologis, terdiri dari :

1. Penelitian berlakunya hukum, yang meliputi :

¹Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaka, 2009), h.12-13.

- a. Penelitian efektivitas hukum
 - b. Penelitian dampak hukum
2. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis²

Melalui pendekatan syar'i diharapkan dapat memperjelas fungsi dan peran hukum Islam dalam membangun hukum nasional.

C. *Sumber Data*

Dalam penulisan ini dilihat dari cara memperoleh dan mengumpulkan data, maka penulis membedakan data menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- 1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti
- 2. Data sekunder adalah sejumlah data atau keterangan yang diperoleh secara tidak langsung dari informan melainkan melalui bahan-bahan dari arsip atau dokumen, literatur-literatur yang telah disusun oleh instansi atau pihak-pihak subyek penelitian.

Sumber informasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian dapat penulis tegaskan bahwa sumber informasi yang akan dipilih oleh penulis adalah terdiri dari Kepala Unit Perlindungan perempuan dan anak (PPPA), serta penyidik yang terlibat langsung dalam penyidikan atau kasus . Adapun informan tersebut adalah:

- a. Kepala Unit Perlindungan perempuan dan anak (PPPA), sebagai pimpinan atau Pembina dalam ruang lingkup kepolisian dan mengetahui efektifitas peraturan di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan sekitarnya.
- b. Kepala penyidik Polrestabes Makassar, yang menjadi pihak yang turun langsung untuk mengumpulkan bukti dari proses penyidikan.

²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.30.

Sedangkan sumber informasi yang kedua diperoleh melalui studi terhadap dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan data/informasi yang akan diperoleh. Dokumen-dokumen atau literatur-literatur tersebut, terutama diperoleh melalui Sektor Polrestabes Makassar dan unit-unit di dalamnya sehingga diharapkan peneliti dapat temukan fakta tentang sebab-sebab atau bagaimana kasus yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga akan mencari data/informasi dari sumber-sumber lainnya seperti internet, surat kabar, majalah, jurnal laporan hasil penelitian dan lain sebagainya.

D. *Metode Pengumpulan Data*

Sesuai dengan permasalahan, tujuan penelitian, dan sumber data maka metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.³

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa tanya jawab secara lisan antara pencari informasi dengan sumber informasi (informan). Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dipergunakan karena merupakan alat efektif dalam pengumpulan data sosial tentang tanggapan, pendapat, perasaan, motivasi, keyakinan, hasil pemikiran, dan pengetahuan seseorang tentang masalah penelitian atau makna suatu kasus, perilaku dan lain-lain.

Bagi peneliti, yang perlu disadari adalah bahwa dalam wawancara terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil wawancara, yaitu: pewawancara,

³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.118.

responden, topik penelitian (yang tertuang dalam daftar pertanyaan), dan situasi wawancara.⁴

Dalam penelitian ini penulis memilih teknik wawancara secara mendalam (*depth interview*) dimana yang diwawancarai tidak harus menjawab pada pertanyaan yang sudah disediakan, dengan maksud untuk mendapatkan data secara mendetail atau terperinci.

c. Telaah dokumen

Telaah dokumen ini dilakukan dengan mencari dan menelaah data dari dokumen (bentuk laporan, jurnal ilmiah, buku-buku tentang pendapat, teori) yang berhubungan dengan *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan.

Pengumpulan data berarti suatu proses pencarian data dari tidak ada menjadi ada untuk keperluan penelitian, untuk mendapatkan data itu selain menggunakan wawancara dengan subyek secara langsung, juga dengan menelaah dokumen yang ada.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data diantaranya, klasifikasi data, melakukan penyuntingan data pemberian kode, melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data, dan melakukan analisis data sesuai dengan pembahasan hasil penelitian.

Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga data yang didapat merupakan data valid yang menentukan kualitas dari hasil penelitian. Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan

⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h.73.

analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Teknik analisis data yang akan dilaksanakan adalah, mengorganisir data yang sudah diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen, mengembangkan kategori dalam proses reduksi data yaitu proses seleksi data dengan membuang hal yang tidak penting, selanjutnya menyajikan data yang sudah diverifikasi dalam bentuk susunan informasi yang memungkinkan dapat ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian dikaitkan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian

Makassar sebagai pusat pemerintahan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat investasi, pusat industri, pusat pariwisata, pusat hiburan dan sekaligus pusat segala aktivitas ekonomi lainnya. Yang juga merupakan pintu Kawasan Indonesia Timur (KIT), Posisi yang sangat strategis ini membuat kota Makassar menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan dan Indonesia timur.

Membahas permasalahan yang terkait dengan kejahatan maka dapat dipahami bahwa setiap lingkungan dalam hal ini termasuk juga di wilayah Sulawesi Selatan terdapat instansi khusus yang menjadi wakil pemerintah untuk menjalankan sistem dan fungsi hukum dimana telah kita ketahui bahwa hal tersebut merupakan fungsi Polrestabes.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai fungsi Polrestabes, sangat diperlukan penjelasan mengenai bagaimana tentang polres itu sendiri, dimana Polrestabes Makassar berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 9, Pattunuang, Wajo Kota Makassar.

Adapun visi dan misi Polrestabes itu sendiri adalah :

a. Visi

Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat wilayah kota Makassar dengan mewujudkan tampilan polisi yang terampil cepat profesional serta kuat dan dipercaya masyarakat melalui giat pengelolaan permasalahan dan pengelolaan kepolisian yang terprogram dan sistematis sehingga dapat mewujudkan situasi wilayah kota Makassar yang aman dan dinamis.

b. Misi

1. Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Selalu melaksanakan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam rangka menjawab tantangan perubahan sosial yang ada serta dalam rangka mewujudkan tampilan kesatuan yang kuat melayani dan melindungi masyarakat.
3. Menekan gangguan kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan preentif, preventif dan penegaka hukum yang terukur, profesional dan proporsional serta menjunjung tinggi HAM dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat.
4. Memelihara kamtibmas dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai masyarakat demokratis
5. Menegakkan hukum secara cepat profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
6. Mengelola SDM polri di lingkungan polsek rappocini secara profesional dalam rangka optimalisasi tugas dan tujuan polsek Rappocini
7. Mengelola sarana dan prasarana serta sumber daya materiil kesatuan dan rangka menunjang kebutuhan operasional pelaksanaan tugas.
8. Melakukan pelaksanaan fungsional kepolisian sehingga dapat mewujudkan polsek yang dapat di percaya masyarakat
9. Mewujudkan model pengelolaan kepolisian yang sistematis secara utuh, sinergi dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.

10. Melaksanakan upaya mendekatkan polisi dan masyarakat melalui aktifitas nyata mendatangi, berkomunikasi saling berbagi informasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan sejak dini dalam rangka pemolisian yang berbasis masyarakat.

B. Kekuatan Visum et repertum

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Yuliaman seorang penyidik yang bertugas di Polrestabes Makassar dapat dikatakan kasus tindak pidana perkosaan terjadi dalam jumlah yang tidak sedikit.

Mengenai kuantitas perkara tindak pidana perkosaan khususnya yang ditangani oleh Polrestabes Makassar selama Januari 2015 sampai dengan Mei 2017 dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 1

Kasus Tindak Pidana Perkosaan yang ditangani Penyidik Polrestabes Makassar selama tahun 2015 sampai Mei tahun 2017

No	Tahun	Kasus
1	2015	43
2	2016	42
3	2017	17
	Jumlah	102

Sumber data : Polrestabes Makassar

Berdasarkan tabel diatas kita bisa ketahui bahwa kasus tindak pidana perkosaan yang ditangani Polrestabes Makassar mulai berkurang tiap tahunnya.

Keberadaan *visum et repertum* yang selalu menjadi barang bukti dalam penyidikan tindak pidana perkosaan, hal ini dimungkinkan sebagaimana yang mengatur perihal permintaan bantuan yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan medis yang dilakukannya terhadap korban perkosaan.

Dalam prosedur untuk mendapatkan *visum et repertum* korban perkosaan, sebagaimana ketentuan yang ada penyidik membuat Surat Permintaan *visum et repertum*. Korban perkosaan yang secara administratif ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit tempat dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban. Dalam surat tersebut termuat keterangan mengenai korban sebagai berikut :

1. Nama, tanggal lahir/ umur, kewarganegaraan, pekerjaan, agama, dan alamat;
2. Tempat dan waktu terjadinya perkosaan;
3. Tanggal dan jam pengaduan dan pelaporan kepada Polisi atau ditemukan Polisi;
4. Dibawa/datang ke kantor Polisi oleh siapa, tanggal dan jamnya atau ditemukan oleh Polisi;
5. Barang bukti yang disertakan agar disebutkan secara lengkap dan jelas.

Dalam Pembuatan *visum et repertum* perkosaan, pemeriksaan medis terhadap korban sebaiknya dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian/spesialis kandungan dan penyakit kebidanan yang memang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan untuk membuktikan unsur persetubuhan yang dialami korban perkosaan, yang dengan sendirinya pemeriksaan medis terhadap hal ini akan lebih terkonsentrasi pada alat kelamin korban.

Sebagaimana prosedur yang telah dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan *visum et repertum* diatas, hasil *visum et repertum* dapat diketahui oleh penyidik selambat-lambatnya 1 bulan setelah pemeriksaan pada korban. Hal ini mengingat bahwa dalam pembuatan *visum et repertum* juga dilakukan beberapa tes laboratorium terhadap beberapa hal yang ditemukan pada korban saat pemeriksaan.¹

Visum et repertum yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban perkosaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi penyidik khususnya untuk mengetahui adanya unsur persetubuhan yang terjadi pada diri korban. Mengingat penyidik tidak mempunyai kemampuan dan keahlian untuk membuktikan adanya tanda persetubuhan pada diri korban perkosaan. Pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap korban perkosaan hanya sebatas pemeriksaan fisik bagian luar dan tidak mungkin mengetahui tanda persetubuhan yang terdapat dalam alat kelamin korban.²

Selain untuk mengetahui adanya tanda persetubuhan, *visum et repertum* juga memuat hasil pemeriksaan terhadap adanya tanda-tanda kekerasan pada diri korban. Dimana unsur ini juga merupakan unsur penting dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan selain dengan unsur persetubuhan. Dimana kedua unsur ini merupakan unsur utama yang harus ditemukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kasus perkosaan.³

Visum et repertum yang memuat hasil pemeriksaan medis mengenai keadaan korban yang dilakukan oleh dokter yang berwenang merupakan salah

¹ Wawancara dengan Bapak IPTU Yuliaman, Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, tanggal 11 Mei 2017.

² Wawancara dengan Bapak IPTU Yuliaman, Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, tanggal 11 Mei 2017.

³ Wawancara dengan Bapak IPTU Yuliaman, Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, tanggal 11 Mei 2017.

satu barang bukti yang sangat kuat bagi penyidik untuk mengadakan penyelidikan lebih lanjut, seperti melakukan penggeledahan, penyitaan, penahanan atau tindakan lainnya.

Mengenai hal-hal yang secara umum termuat dalam *visum et repertum* yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang dapat membantu penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana perkosaan :

1. Pada bagian pemberitahuan atau hasil pemeriksaan. Dalam *visum et repertum* yang dimintakan untuk penyidikan kasus perkosaan, hasil pemeriksaan medis terhadap korban yang termuat pada bagian ini pada umumnya adalah sebagai berikut :
 - a. Keterangan mengenai waktu dan keadaan fisik luar korban yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Keadaan luar korban seperti pakaian yang digunakan (meliputi pakain dalam), alas kaki yang dikenakan dan barang lain yang dikenakan korban. Mengenai barang yang dikenakan korban, hal ini diuraikan sejelas mungkin oleh dokter pemeriksa mengingat hal tersebut juga penting bagi penyidik untuk menjadikan barang tersebut sebagai barang bukti jika pakaian tersebut digunakan korban pada saat terjadinya tindak pidana perkosaan.⁴
 - b. Hasil pemeriksaan medis terhadap adanya tanda kekerasan pada bagian tubuh korban yang meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kiri dan kanan, anggota gerak bawah kiri dan kanan.
 - c. Hasil pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur, meliputi pemeriksaan terhadap :

⁴Wawancara dengan Bapak IPTU Yuliaman, Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, tanggal 11 Mei 2017.

- 1) Otot lingkar dubur (regangan baik atau tidak) ;
 - 2) Selaput lendir poros usu (licin atau tidak) ;
 - 3) Selaput darah (mengalami robekan atau tidak, lama atau baru robekan tersebut dan pada arah jam berapa robekan tersebut berada);
 - 4) Kerampang kemaluan (terdapat luka atau tidak);
 - 5) Rahim (dalam ukuran normal atau mengalami pembesaran karena kehamilan).
- d. Hasil pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur, meliputi pemeriksaan terhadap :
- 1) Hasil pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur, meliputi pemeriksaan terhadap :
 - 2) Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap :
- a) Lendir liang senggama (apakah ditemukan sel mani atau tidak) ;
 - b) Air seni untuk pemeriksaan adanya kehamilan (positip atau negatif).

2. Pada bagian kesimpulan

Bagian ini merupakan kesimpulan yang diambil dari hasil pemeriksaan terhadap korban, pada umumnya berisi keterangan tentang :

- a. Keadaan selaput darah penderitanya (Pernah mengalami persetubuhan atau tidak);
- b. Adanya kehamilan atau tidak dan jika ada berapa usia kehamilan tersebut;
- c. Adanya tanda kekerasan atau tidak pada diri korban;
- d. Ditemukan sel mani atau tidak dalam liang senggama korban.

Bagian dari laporan atau hasil pemeriksaan merupakan bagian yang terpenting dari *visum et repertum* karena memuat hal-hal yang ditemukan pada korban saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Bagian ini merupakan bagian yang paling obyektif dan menjadi ini *visum et repertum* karena setiap dokter

diharapkan dapat memberikan keterangan yang selalu sama yang sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Setiap bentuk kelainan yang terlihat akan dijumpai langsung dituliskan apa adanya tanpa disisipi pendapat-pendapat pribadi. Pada bagian ini terletak kekuatan bukti suatu *visum et repertum* yang bila perlu dapat dipakai sebagai dasar oleh dokter lain sebagai pembanding untuk menentukan pendapatnya. Dengan membaca hal-hal yang termuat dalam *visum et repertum* terutama pada bagian pemberitaan seperti tersebut diatas, penyidik dapat memperoleh gambaran yang cukup penting dan tidak sedikit mengenai tindak pidana perkosaan yang terjadi pada korban.

1. Terdapatnya unsur persetubuhan pada diri korban

Unsur persetubuhan merupakan unsur penting dalam tindak pidana perkosaan, unsur ini merupakan unsur yang harus dibuktikan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan. Terhadap unsur persetubuhan, dalam *visum et repertum* tanda terjadinya persetubuhan dapat dilihat hasil pemeriksaan selaput darah korban, apabila terjadi robekan kemungkinan besar korban telah mengalami persetubuhan, namun demikian tidak terdapatnya robekan juga tidak berarti korban tidak mengalami persetubuhan. Elastisitas selaput dara, besar kecilnya penis, derajat penetrasi penis, serta posisi persetubuhan, dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan selaput darah korban.⁵

Mengenai unsur persetubuhan apakah korban seperti wanita yang belum atau pernah bersetubuh, hal ini selalu dinyatakan oleh Dokter pada bagian kesimpulan *visum et repertum* tersebut. Untuk mengetahui dan membuktikan

⁵Wawancara dengan Bapak IPTU Yuliaman, Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, tanggal 11 Mei 2017.

adanya unsur persetubuhan, pada umumnya penyidik mengacu pada hasil pemeriksaan selaput dara di bagian hasil kesimpulan *visum et repertum*.⁶

2. Perkiraan saat terjadinya persetubuhan terhadap korban

Saat terjadinya persetubuhan pada korban penting diketahui oleh penyidik dalam hal memeriksa alibi tersangka yang dapat mengelak tindak pidana perkosaan yang disangkakan. Ada tidaknya sel mani pada liang senggam korban yang dapat termuat dalam *visum et repertum* dapat menunjukkan saat terjadinya persetubuhan.

3. Adanya unsur kekerasan pada tubuh korban

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam penyidikan tindak pidana perkosaan harus dapat ditemukan dan dibuktikan oleh penyidik agar dapat memproses perkara tersebut lebih lanjut.

4. Hasil pemeriksaan terhadap alat bukti lain yang terkait dengan tindak pidana perkosaan.

Pada saat pembuatan *visum et repertum* dilakukan terhadap korban perkosaan, biasanya barang bukti yang dapat menunjukkan bekas terjadinya tindak pidana perkosaan, seperti misalnya celana dalam korban, pakaian korban yang dipakai pada saat kejadian. Pemeriksaan terhadap benda-benda tersebut dimaksudkan untuk memeriksa adanya bekas darah atau sperma yang dicocokkan dengan darah dan sperma pelaku, disamping kemungkinan adanya bekas perlawanan/tanda kekerasan yang terdapat pada pakaian tersebut.

Hasil pemeriksaan barang bukti ini dengan sendirinya dapat menguatkan kedudukan benda-benda tersebut sebagai salah satu barang bukti dalam tindak pidana perkosaan yang penting, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap pemeriksaan persidangan perkara tersebut.

⁶ Wawancara dengan Bapak IPTU Yuliaman, Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, tanggal 11 Mei 2017.

Sebagai mana yang terurai diatas menunjukkan peranan *visum et repertum* yang membantu dan dapat memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana perkosaan. Lengkapnya hasil pemeriksaan *visum et repertum* terhadap korban perkosaan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan, serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil *visum et repertum*, menjadi kekuatan dalam menemukan kebenaran materi yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana perkosaan.

Visum et repertum membantu penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang cukup disamping bukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya seperti keterangan korban, keterangan saksi, keterangan tersangka serta pemeriksaan barang bukti lainnya. Dengan adanya hasil *visum et repertum* terhadap seseorang yang diduga korban tindak pidana perkosaan, seorang penyidik akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar terjadi begitupun sebaliknya.

Berdasarkan peranan yang dapat diberikan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana perkosaan sebagaimana yang dijelaskan diatas, hal ini menyebabkan kedudukan *visum et repertum* menjadi salah satu alat bukti yang kekuatannya dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara makanya harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara hingga sampai ditahap persidangan. Pembuatan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan dalam tindak pidana perkosaan adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan.⁷

⁷Wawancara dengan Bapak IPTU Yuliaman Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Polrestabes Makassar, tanggal 11 Mei 2017.

C. Faktor yang menjadi kendala *Visum et repertum* dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan

Seperti yang dikatakan oleh bapak Iptu Yuliaman selaku penyidik di Polrestabes Makassar bahwa kendala dalam *visum et repertum* itu bisa dikatakan tidak ada malah *visum et repertum* itu justru membantu penyidik, seperti contoh, perempuan tersebut bersenggama dengan laki-laki lain atau banyak lelaki maka hasil visum akan melacak riwayat kejadian tersebut untuk mengetahui siapa yang menjadi bapak daripada cabang bayi tersebut dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Setiap peristiwa itu meninggalkan jejak atau dengan kata lain ciri-ciri daripada jenis benda yang masuk ke dalam alat vital perempuan. Apabila pelecehan seksual tersebut segera dilaporkan dalam hari yang sama, maka pihak yang keberatan langsung ditindak lanjuti guna mendapatkan kepastian hukum. Hal tersebut mendukung penuh peran *visum et repertum*, apalagi yang ingin memperoleh perlindungan dan pembelaan hukum.⁸

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembuktian menggunakan *Visum et repertum* dalam Tindak Pidana Perkosaan.

Hukum acara pidana apabila korban ingin mengajukan gugatannya maka korban baru harus memiliki alat bukti sebagai dasar atas gugatannya. Karena tujuan dari pembuktian yaitu untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa atau perkara yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar.

Pembuktian yang dianalisis oleh penulis disini adalah pembuktian tindak pidana perkosaan yang menggunakan alat bukti *visum et repertum* yaitu suatu keterangan dokter tentang apa yang ia lihat dan dia temukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terhadap mayat, merupakan

⁸Wawancara dengan Bapak IPTU Yuliaman Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Polrestabes Makassar, tanggal 11 Mei 2017.

kesaksian tertulis untuk kepentingan peradilan. Sedangkan di dalam hukum Islam tindak pidana perzinaan hampir semua ulama' bersepakat yaitu dengan empat orang saksi laki-laki pendapat mereka berdasarkan Al-Qur'an surah An'Nur ayat 14 dan juga Surah An Nisa ayat 16 akan tetapi, Islam merupakan agama yang sarat akan nilai-nilai spiritual, moral dan hukum tidak bisa tinggal diam terhadap berbagai perkembangan sains dan teknologi dan agama yang selalu setiap ruang dan waktu.

Pembuktian dalam hukum Islam dari :

1. *Bayyinah* (fakta kebenaran)
2. Sumpah
3. Saksi
4. Bukti tertulis
5. Firasat
6. *Qarinah* (tanda-tanda)

Tindak pidana perkosaan dalam hukum Islam harus memiliki empat orang saksi akan tetapi jika melihat sifat hukum Islam yang senantiasa sesuai dengan ruang dan waktu sehingga hukum Islam harus mampu menjawab permasalahan seperti sekarang ini.

Di dalam hukum Islam dikenal dengan adanya *qiyas* yang mana *visum* disini menurut penulis diqiyaskan alat bukti *visum et repertum* dengan alat bukti petunjuk atau *qorinah* firman Allah SWT dalam surah yasin ayat 12 yang berbunyi:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فِي أَحْصَيْنَاهُ
 إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Penjelasan ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT berkuasa untuk menghidupkan orang yang mati dan menulis apa yang telah dikerjakan oleh manusia baik amalan yang bermanfaat seperti ilmu pengetahuan, harta benda yang diwakafkan, atau amalan baik yang lainnya tetapi Allah juga menulis amalan yang jahat yang ditinggalkannya. Ringkasnya Allah menulis setiap amalan yang baik atau jahat dalam kitab Induk (Lauhul Mahfudz).

Seperti halnya dalam tindak pidana perkosaan Allah juga telah memberikan bekas-bekas yang mereka tinggalkan atas perbuatan mereka sehingga dengan adanya pembuktian menggunakan *visum et repertum* tindak pidana perkosaan dapat diungkapkan kebenarannya dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri adalah untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat atau untuk mengayomi masyarakat sehingga diperoleh kebenaran dan keadilan.

Sebagai contoh jika seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya sedang berdua-an masuk di dalam kamar hotel dan setelah mereka keluar di dalam kamar tersebut terdapat cairan sperma, bercak darah, dan bukti lainnya seperti potongan rambut baik dari si lelaki atau perempuan hal semacam ini bisa memberikan petunjuk bahwa telah terjadinya perzinahan dengan bantuan dokter ahli forensik yang menggunakan kemampuan dan pengetahuannya itu

melakukan penelitian atas adanya bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara dengan *visum et repertum* yang diminta oleh penyidik untuk kepentingan peradilan.

Dalam contoh kasus lain bahwa *visum et repertum* bisa membantu mengungkapkan tindak pidana perkosaan terhadap korban dokter ahli forensik dapat memeriksa diri korban menvisum bagian tertentu seperti adanya kerusakan terhadap *vagina* korban bagian selaput darahnya robek (hymen) atau telah terjadinya kekerasan yang ada pada diri korban akibat paksaan oleh pelaku dengan tujuan peradilan apakah dalam diri apakah dalam diri korban itu benar-benar terjadi tindak pidana perkosaan atau tidak dengan kecanggihan teknologi kedokteran seperti sekarang ini sehingga mempermudah penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana perkosaan. Uraian di atas menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian menggunakan *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan kekuatannya sama dengan kekuatan pembuktian perkosaan yang menggunakan empat orang saksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana yang terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini penulisan mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa keberadaan *visum et repertum* selalu dibutuhkan setiap penyidikan tindak pidana perkosaan, dalam hal ini *visum et repertum* selalu menjadi alat bukti dalam penyidikan tindak pidana perkosaan, *visum et repertum* mempunyai kekuatan bagi penyidik untuk mengetahui adanya unsur persetubuhan dan unsur kekerasan yang terjadi pada diri korban, serta menjadi salah satu alat bukti yang harus selalu ada dalam setiap pemeriksaan perkara perkosaan hingga tahap persidangan.
2. Bahwa di wilayah hukum Polrestabes Makassar *Visum et repertum* sama sekali tidak memiliki kendala apapun dalam pelaksanaan pembuktian suatu perkara, melainkan sebaliknya *visum et repertum* sudah membantu Penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara.
3. Bahwa kekuatan pembuktian menggunakan *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan kekuatannya sama dengan pandangan hukum Islam yang kekuatan pembuktian tindak pidana perkosaannya menggunakan empat orang saksi.

B. *Saran*

1. Mengingat kekuatan *visum et repertum* itu sangat kuat untuk membantu penyidik dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana, maka sebaiknya setiap permintaan *visum et repertum* dibuat oleh dokter ahli forensik yang dimana mengerti dan ahli dalam bidangnya.
2. Mengingat *visum et repertum* itu sendiri tidak memiliki kendala apapun dalam proses penyelesaian perkara, jadi semoga kedepannya jika ada kasus mengenai *visum et repertum* itu sendiri lebih mudah dan cepat untuk terselesaikan.
3. Mengingat pembuktian kekuatan *visum et repertum* dalam hukum Islam sama kekuatannya dengan menggunakan empat orang saksi maka orang yang seharusnya menjadi saksi dalam kasus tindak pidana perkosaan itu sendiri adalah orang yang tahu betul mengenai kronologi perkara perkosaan bukan mengetahui dari cerita orang lain.

KEPUSTAKAAN

- Adi,Rianto. 2004*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Bhafana Publishing, Redaksi. 2013 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Surabaya:Bhafana Publishing.
- Bungin, Burhan. 2007*Penelitian Kualitatif*.Cet. 2; jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. 2007 *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diakses dari <http://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditemukannya/> pada tanggal 2 Juli 2017 pukul 11.14
- Effendi, Erdianto. 2011 *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2011*Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*.Jakarta:SinarGrafika.
- Hamzah, Andy. 1984 *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kementrian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surabaya: Karya Anda.
- Meleong, Lexy J. 2009*Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaka.
- Moeljatno. 1993*Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mun'im, Idries Abdul. 1997 *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*. Jakarta barat: Binarupa Aksara.
- Republik Indonesia KUHP dan KUHAP*2007. Jakarta: Visimedia.
- Setiady, Tolib. 2010 *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia* . Bandung: Alfabeta.
- Sofyan. Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Subekti,R. 2005*Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sulaeman, Munandar. 2010 *Kekerasan terhadap Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suparni, Niniek. 2007 *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dalam Sistem pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, Rahman. 2011 *Peranan Visum et repertum di Pengadilan*. Jakarta: AL-Risalah.

- Wahid, Abdul dkk. 2001 *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*
Bandung: PT Refika Aditama.
- Waluyadi. 2000 *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Djambatan.
- Wawancara dengan Bapak IPTU Yuliaman, Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar, tanggal 11 Mei 2017.
- Zainal Asikin,dkk 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

5/12 16
Kc Kc for

FORMAT PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI :

H a l : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,
Ketua Jurusan/Program Studi
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di
Samata-Gowa

buat draft no 4
fy

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rini Damayanti
NIM : 10300113081
Semester/Klpk : VII/B
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

- ☒ Implementasi Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Makassar (studi kasus LBH Makassar). / judul sda ada
- ☒ Tinjauan Yuridis terhadap Delig Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur dalam Wilayah Polsekta Tamalate. / judul sda ada
- ☒ Implementasi Jeratan Hukum tentang Kenakalan Remaja bagi Pelanggar Anak dibawah Umur (studi kasus Polsekta Tamalate)
- ☒ 4. Analisis Yuridis Sosiologis Kekuatan Pembuktian, Fungsi dan Kendala Visum Et Repertum, dalam Proses Penyidikan pada Tindak Pidana Pemerkosaan (~~studi kasus Polsekta Tamalate~~) / Abuch Anhtis Hkcp Mthone dan KKKU 15/11/16

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Mengetahui
Penasehat Akademik

(Prof. Dr. Usman, M. Ag)
NIP : 19580901 199102 1 002

Samata, 30 November 2016

Pemohon,

(Rini Damayanti)
10300113081

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor 287 Tahun 2017
T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI
TAHUN 2017

- Menimbang** :
- Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Menunjuk saudara : 1. Dr. Nila Sastrawati., M.Si
2. Azhar Sinilele., S.H., M.H
Sebagai pembimbing mahasiswa :
Nama : Rini damayanti
NIM : 10300113081
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPK
Judul Skripsi : Analisis Yuridis sosiologi kekuatan pembuktian, fungsi dan kendala visum et repertum, dalam proses penyidikan pada tindak pidana pemerkosaan (studi kasus polsekta Tamalate sebuah analisis hukum nasional dan hukum pidana islam)
 - Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis Ilmiah dengan baik;
 - Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
 - Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 27 Maret 2017

Dekan

Prof. Dr. DARUSSALAM, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: 1787/HPK/2017

Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian pada Visum Et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Polrestaes Makassar.

Gowa, 26 April 2017

Penyusun,



Rini Damayanti

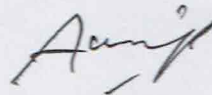
Nim. 10300113081

Pembimbing I



Dra. Nila Sastrawati, M. Si
Nip. 19710712199703 2 002

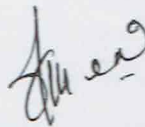
Pembimbing II



Ashar Sinilele, SH., MM., MH
Nip. 19690717 201411 1 001

Diketahui Oleh:

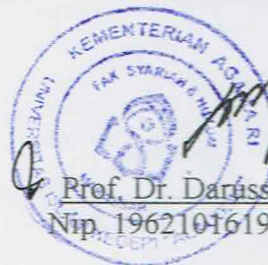
Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan



Dra. Nila Sastrawati, M. Si
Nip. 19710712199703 2 002

Disahkan Oleh:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
Nip. 196210161990031003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5633/S.01P/P2T/04/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Kapolrestabes Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.17/1751/2017 tanggal 26 April 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **RINI DAMAYANTI**
Nomor Pokok : 10300113081
Program Studi : HPK
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN PADA VISUM AT REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 s/d 29 Mei 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 27 April 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 27-04-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222



Gambar Kantor Polrestabes Makassar



Berfoto dan berbincang dengan polisi di bagian Hukum



**Foto setelah wawancara dengan IPTU Yuliaman , Penyidik dibagian PPA
Polrestabes Makassar**





SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SKP / 77 / V / 2017 / Subbagkum

1. Rujukan :

- a. Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 5633/ S.01/ P2T/ 04/ 2017, tanggal 27 April 2017. Perihal izin penelitian.
- b. Lembar Disposisi Kapolrestabes Makassar Melalui Waka No Agenda : B / 921 / V / 2017 / Sium tanggal 2 Mei 2017 .

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : Rini Damayanti
NIM : 10300113081
Program Studi : HPK
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat kampus : Jl. Muh Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan judul :

“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN PADA VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR ”

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 30 Mei 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
KABAGSUMDA POLRESTABES MAKASSAR



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Mks.

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 14/ Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Rini Damayanti
NIM : 10300113081
Jurusan : Hukum Pidana & Ketatanegaraan (HPK)
Hari/Tanggal : Rabu / 09 Agustus 2017
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pada Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Polrestabes Makassar"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.SI
Penguji I : Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd
Penguji II : Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil /Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 07 Agustus 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : SI.1/PP.00.9/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 07 Agustus 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
 2. Dra. Nila Sastrawati, M.SI. (Sekretaris)
 3. Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd. (Penguji I)
 4. Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag. (Penguji II)
 5. Dra. Nila Sastrawati, M.SI. (Pembimbing I)
 6. Azhar Sinilele, S.H., M.H. (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :


Nama : Rini Damayanti
N I M : 10300113081
Jurusan : Hukum Pidana & Ketatanegaraan (HPK)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Agustus 2017
Waktu : Pukul 11.00 – 12.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan HPK

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **RINI DAMAYANTI**, NIM **10300113081** mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar**". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasyah (Akhir).

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk di proses lebih lanjut.

Samata, 15 Agustus 2017

Pembimbing I



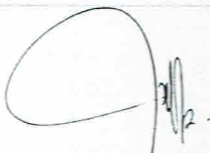
Dra. Nila Sastrawati, M.Si
NIP: 19710712 199703 2 002

Pembimbing II



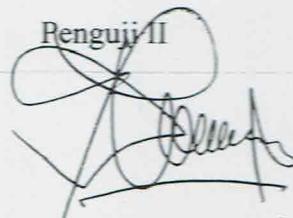
Azhar Sinilele., S.H., M.H
NIP: 19690717 201411 1 001

Penguji I



HJ. Rahmiati, S.pd., M.pd
NIP: 19771005 200901 2 005

Penguji II



Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag
NIP: 19701018 199703 1 002

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN

MAKASSAR

Nomor : 1273 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Rini Damayanti
N I M : 10300113081
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Hari/Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.
Penguji I : Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd.
Penguji II : Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag.
Pelaksana : 1. Mujahidah, S.E.
2. Nurhayati Wahid

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 21 Agustus 2017

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : 2347/SI.1/PP.00.9/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 21 Agustus 2017

Kepada

- Yth.
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. (Sekertaris)
 3. Hj. Rahmiati, M.Pd. (Penguji I)
 4. Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag. (Penguji II)
 5. Dra. Nila Sastrawati, M.Si. (Pembimbing I)
 6. Azhar Sinilele, S.H., M.H. (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Rini Damayanti

N I M : 10300113081

Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2017

Buka Sidang : 08.30 WITA

Waktu : Pukul 10.00 – 11.00 WITA

Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



RINI DAMAYANTI, lahir di Ujung pandang pada tanggal September 1995. Merupakan anak pertama dari tiga bersudara. Buah hati dari Bapak Adri Ismail dan Ibu Fatma ariyani. Mulai memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2001 di SD Inp. Maccini Sombala, kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2007 hingga 2010 di SMPN 18 Makassar . Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2010 ke sekolah SMAN 3 Makassar dan tamat pada tahun 2013.

Setelah menamatkan pendidikan SMA, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum. Dan selama perkuliahan penulis pun pernah menjabat menjadi bendahara umum HMJ Pidana dan Ketatanegaraa periode 2015-2016 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.